

POLAH RAJA JULI DISOROTI

**Bentuk OMO Folu Net Sink 2030:
Didominasi Kader PSI, Digaji Rp 50 Jutaan**

Sepekan terakhir, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjadi sorotan publik, terutama warganet. Terbaru, dia membentuk Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Ternyata di dalam struktur pengurusnya, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendominasi. Hal ini tertuang dalam salinan SK Menteri Kehutanan No. 32 per tanggal 31 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.234 tahun 2024. Tertulis, Gmgaji tertinggi didapat penanggungjawab/pengarah yakni Rp 50 juta. Sementara Wakil penanggungjawab/pengarah dibayar Rp 50 juta, anggota Rp 20 juta. Raja Juli menegaskan pendanaan dari donor dan negara mitra. Dipastikannya tidak bersumber dari APBN. Dugaan bagi-bagi jabatan tersebut hanya menjadi salah satu dari rentetan sorotan netizen terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI itu. Sebelumnya, dia juga banjir sentilan di media sosial usai mengomentari Anies Baswedan terkait dakwahnya di Masjid Kampus UGM. Raja Juli Antoni menyebut Anies menjadikan masjid sebagai tempat menyidur politik. Netizen khususnya di X menilai Menhut tersebut lebih mirip komentar dari pendengung (buzzer) ketimbang pernyataan seorang pejabat negara. Sebelumnya, polah Raja Juli juga menjadi bahan pembicaraan saat dirinya mengungkapkan telah melakukan video call dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (4/3/2025) membahas komoditas aren untuk ketahanan energi dan pangan.

Baca Hal 11....



Kader PSI yang Masuk FOLU Net Sink 2030:

-  Andy Budiman menjabat Dewan Penasehat
-  Kokok Dirgantoro sebagai anggota bidang Pengelolaan Hutan Lestari
-  Endika Fitra Wijaya sebagai Staf Kesekretariatan bidang Pengelolaan Hutan Lestari
-  Sigit Widodo sebagai anggota bidang Peningkatan Cadangan Karbon
-  Rama Hadi Prasetya sebagai Staf Kesekretariatan Peningkatan Cadangan Karbon
-  Furgan Amini Chaniago sebagai anggota bidang Konservasi
-  Nandya Maharani Irawan sebagai Staf Kesekretariatan bidang Konservasi.
-  Andi Syaiful Oeding dan Yus Ariyanto sebagai anggota bidang Pengelolaan Ekosistem Gambu
-  Nurtanti sebagai anggota bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas,
-  Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas.
-  Yus Ariyanto sebagai Anggota Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut

Daftar honor bulanan struktur organisasi

OMO FOLU Net Sink 2030

-  Penanggung Jawab atau Pengarah Rp50 juta
-  Ketua Pelaksana Rp30 juta
-  Wakil Penanggung Jawab atau Pengarah Rp 40 juta
-  Ketua Harian I Rp30 juta
-  Dewan Penasihat Ahli Rp25 juta
-  Ketua Harian II Rp30 juta



Anies Beri Dukungan Tom Lembong

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam sidang perdana eks Menteri Perdagangan RI Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong terkait kasus dugaan korupsi importasi gula di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025). Tom Lembong yang menjadi bagian dari Timnas AMIN saat Anies maju di Pilpres 2024 didakwa melakukan korupsi importasi gula yang merugikan negara hingga Rp 578 miliar. Di persidangan terungkap dakwaan jaksa memaparkan ada 10 orang yang mendapat keuntungan dalam perkara ini. Namun, tak ada nama Tom di dalam daftar tersebut. Baca berita lengkap di halaman 5.(ist)

Buntut Banjir Jabodetabek 4 Objek Wisata di Puncak Disegel karena Langgar Alih Fungsi Lahan

Wisata Hibisc Fantasy yang beroperasi di Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, disegel pada Kamis (6/3/2025) karena diduga melakukan pelanggaran, mulai dari izin lokasi yang melebihi ketetapan hingga pelanggaran lingkungan. (Antara)



JAKARTA- Sebanyak 4 objek wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, disegel pada Kamis (6/3/2025) karena dinilai melanggar alih fungsi lahan. Penyegehan tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Bupati Bogor Rudy Susmanto.

Keempat tempat wisata yang disegel yakni Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 1 Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land.

Hanif menyampaikan, ada indikasi pelanggaran pidana yang dilakukan dalam pembangunan empat tempat wisata tersebut.

Berdasarkan hasil kajian, keempat bangunan itu telah berkontribusi menyebabkan banjir dengan kerugian material yang cukup besar dan satu korban jiwa. "Ini pemerintah pusat tidak boleh diam. Kita harus mengambil langkah-langkah serius dan ini kejadian ini sudah berulang ulang. Artinya alam telah mengkalibrasi bahwa kalau kita berbuat seperti ini terus bencana di hulu di hilir cukup besar," ujar Hanif.

Hanif menambahkan, penyegehan ini sedianya akan terus berlanjut di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, mulai dari kawasan hulu di Puncak hingga hilir di wilayah Jakarta.

"Segmen satu dari DAS Ciliwung. Nah, segmen hulu ini ada di Kabupaten

Bogor. Kemudian, segmen kedua ada di Kota Bogor. Segmen tiganya Kabupaten lagi. Segmen empatnya

utamanya warga di Jakarta. Jangan lagi bangun bangunan vila dan sejenisnya di Puncak," tegas Dedi.

Depok. Segmen lima dan enam di Jakarta," terang Hanif.

Sementara itu, Dedi Mulyadi menegaskan akan mengembalikan alam Jawa Barat seperti semula sesuai dengan penataan ruang. Hal itu demi menyelamatkan warga Jawa Barat dan Jakarta.

"Untuk itu juga kami akan berkoordinasi dengan Gubernur Jakarta untuk membicarakan ini karena Jawa Barat itu palang pintunya Jakarta dan paling

Menanggapi maraknya alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto bakal mencoba kewenangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Bogor, dalam memberikan izin. Ia mengaku akan lebih selektif dalam mengeluarkan berbagai izin, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan di Kabupaten Bogor.

"Saya mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang baru, hari ini kita tanda tangani, yaitu menarik seluruh proses perizinan dikembalikan ke kepala daerah. Perizinan pendelegasian tugas ke masing-masing SKPD kami tarik kembali," ungkap Rudy.

Dalam tahapan pengurusan izin, setelah melalui mekanisme di SKPD masing-masing dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), perizinan perlu meminta persetujuan kepala daerah. Tak hanya itu, Rudy juga akan mengevaluasi berbagai izin yang kadung diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bogor. (wid, ant, rls/dya)

Soal Korban Tewas, Gubernur Jakarta Enggan Salahkan Pihak Manapun

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo enggan menyalahkan pihak manapun terkait adanya seorang korban meninggal saat banjir di Jakarta Selatan.

"Saya tak mau menghakimi karena tidak lihat di lapangan (kejadian langsung). Tetapi, yang jelas petugas yang bekerja untuk itu, pasti sudah sungguh-sungguh dan untuk mencari sampai ketemu jam satu malam itu bukan pekerjaan yang mudah. Karenanya, saya tetap melihat dalam perspektif yang positif," kata Pramono di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Sebelumnya, seorang anak laki-laki berinisial A (2) terseret arus Kali Ciliwung saat dilakukan evakuasi banjir di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/3/2025).

Peristiwa itu bermula saat Abidin, istrinya, anak pertamanya, dan korban hendak dievakuasi ke rumah neneknya yang masih berada di kawasan Tebet. Saat berada di atas perahu, arus begitu kencang sehingga menyebabkan air masuk lewat bagian depan perahu.

Air yang masuk lewat bagian

depan perahu semakin banyak hingga menyebabkan perahu oleng dan terbalik. Mereka lalu tercebur ke air dengan kedalaman sekitar 3 meter. Korban ditemukan meninggal dunia tak jauh dari lokasi awal terseret banjir, sehari setelah kejadian.

Korban ditemukan di dekat rumahnya dalam kondisi meninggal pada Rabu (5/3/2025) sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

Pramono mengatakan, saat dirinya mendapat laporan tersebut, dirinya langsung meminta jajarannya untuk berupaya maksimal mencari korban.

Dia pun bersyukur akhirnya korban dapat ditemukan dalam kurun waktu satu hari dan dapat segera dikebumikan oleh keluarga.



Gubernur Jakarta Pramono Anung menaiki helikopter saat melakukan pantauan banjir lewat udara di Langit Jakarta, Kamis (6/3/2025). (Dok. Tim Media Pramono)

Pramono pun kemarin menyempatkan diri untuk takziah ke rumah korban. "Kalau melihat upayanya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh tim yang bekerja untuk evakuasi dan sebagainya. Satu malam dan masih deras. Itu menunjukkan bahwa sekarang ini pemerintah Jakarta sungguh-sungguh dalam persoalan-persoalan seperti itu," kata Pramono. (wid, any/dya)

Dampak Tatib Baru, Laporan Komisi II DPR Bisa Jadi Dasar Evaluasi Pimpinan DKPP

JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan hasil evaluasi Komisi II DPR terhadap pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui rapat paripurna. Evaluasi ini merupakan implementasi dari Pasal 228A Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI No 1/2020 tentang Tata Tertib (Tatib) DPR.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menekankan, laporan Komisi II DPR bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kalau sudah evaluasi nanti akan terus jadi landasan kan hasil evaluasi Komisi II itu," kata Cucun usai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Ia mengibaratkan hasil evaluasi itu sama seperti pemberian surat peringatan atau SP. Dengan begitu, evaluasi dari Komisi II DPR bisa menjadi dasar untuk melakukan tindakan-tindakan.

"Toh sudah dilakukan evaluasi dengan SP1, SP2, SP3, kan sudah ada evaluasinya," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan evaluasi yang dilakukan Komisi II DPR RI itu merupakan perintah dari Tata Tertib DPR RI.

Melalui Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, DPR berhak mengevaluasi secara berkala calon-calon atau pimpinan lembaga yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna DPR.

Menurut ia, evaluasi tersebut meminta agar sumber daya manusia di DKPP lebih profesional dan berintegritas dalam menangani aduan terkait pemilu. Selain itu, DKPP juga perlu memutus aduan-aduan yang masuk karena sejauh ini masih ada yang belum mendapatkan putusan.

Adies pun menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait adanya evaluasi tersebut dan menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada pencopotan terhadap pimpinan DKPP karena evaluasi Komisi II DPR RI.

"Jadi, tidak ada pencopotan apa segala macam. Kita hanya sebatas itu saja memberikan kritikan, masukan bahwa harus seperti ini loh



Pimpinan DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI, yang gelar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/3/2025). (Dok)

sebenarnya DKPP," tutur Adies.

Ada 10 poin utama terkait evaluasi pimpinan DKPP RI 2022-2027 yang disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI F-Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, dalam Rapat Paripurna DPR RI, yang gelar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/3/2025).

"Komisi II DPR RI telah mengadakan rapat dengar pendapat dengan pimpinan DKPP RI terkait evaluasi kinerja pimpinan DKPP periode 2022-2027 secara tertutup pada Selasa 11 Februari 2025," kata Zulfikar.

Peluang Evaluasi Bawaslu

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyatakan, DPR terbuka untuk melakukan mengevaluasi terhadap penyelenggara Pemilu, termasuk ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Mungkin nanti bukan hanya DKPP ya Bawaslu juga mungkin perlu diberikan evaluasi rekomendasi," kata Adies.

Apalagi, kata Adies, banyak hal dari Pemilu kemarin perlu dievaluasi salah satunya soal pemungutan suara ulang (PSU) yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bawaslu kan juga banyak di daerah-daerah nah kerjanya apa juga Bawaslu ini mengawasi begitu tiba-tiba hampir 150-an yang di PSU oleh mk," ujar dia.

Seharusnya, menurut Adies, apabila pengawasan Bawaslu berjalan dengan lancar maka PSU tak mungkin terjadi.

"Kalau ini semua berjalan dengan lancar, baik, DKPP Bawaslu dalam pengawasan dengan baik saya rasa tidak ada yang didiskualifikasi, kecurangan-kecurangan dan juga PSU-PSU yang banyak begitu," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan

Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa adanya 24 daerah yang diperintahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) atas Pilkada 2024, merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia.

"Saya kira ini sejarah, dalam sejarah Indonesia paling banyak yang diulang lagi," kata Doli saat peluncuran diskusi Politics and Colleagues Breakfast (PCB) bertema Urgensi Perbaikan Sistem Politik di Indonesia di Jakarta, Jumat (28/2/2025) seperti dilansir Antara.

Adapun Mahkamah Konstitusi mengabulkan 26 gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada), yang terdiri dari 24 daerah diperintahkan untuk menggelar PSU secara keseluruhan maupun sebagian, dan satu daerah diperintahkan menggelar rekapitulasi suara ulang, dan satu daerah lainnya diminta perbaikan administratif.

Dia mengatakan berbagai masalah yang timbul dalam pilkada maupun pemilu, akan menjadi bahan bagi DPR RI maupun pemerintah untuk memperbaiki sistem politik. Dia mengatakan perbaikan sistem politik di Indonesia sudah sangat mendesak.

Selain itu, dia pun menyoroti adanya ketidakcermatan para penyelenggara pemilu hingga menyebabkan harus adanya PSU. Di samping itu, dia pun menyoroti Mahkamah Konstitusi yang seharusnya hanya mengadili perkara, tetapi justru mengambil keputusan yang di luar kewenangannya.

Dengan begitu, dia pun mempertanyakan apakah pemilu yang sudah digelar sebanyak enam kali setelah masa reformasi sudah benar-benar sesuai tujuannya. Karena dia menilai sejauh ini pesta demokrasi

Poin Evaluasi Komisi II DPR terhadap DKPP

1. Komisi II DPR mendorong DKPP untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperbaiki kondisi internal DKPP dalam hal kompetensi, integritas, dan kapasitas dengan menyelenggarakan pelatihan berkala, sertifikasi, dan rekrutmen anggota berdasarkan kualifikasi yang lebih ketat.

2. Mendorong DKPP untuk meningkatkan kinerja terutama dalam hal percepatan penyelesaian kasus, aduan, pelaporan terkait etik penyelenggara pemilu yang sudah menumpuk pada 2024 dan 2025.

3. Komisi II DPR mendorong DKPP untuk terus menjunjung tinggi independensi dan netralitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penjaga marwah etik penyelenggara pemilu.

4. Proses pengambilan keputusan DKPP hendaknya dilakukan terbuka dan dapat diakses publik. DKPP perlu meningkatkan publikasi putusan laporan kinerja dan proses persidangan secara terbuka, termasuk melalui platform digital.

5. Terkait penegakan kode etik, mendorong DKPP untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan efektif menciptakan efek jera, memastikan konsistensi dalam penerapannya, dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

6. Mendorong setiap putusan DKPP dalam menangani persoalan etik penyelenggara pemilu benar-benar memiliki dampak dan hasil nyata bagi penguatan integritas penyelenggaraan pemilu. DKPP harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk menilai keberhasilan kinerja.

7. Melibatkan lembaga dan partisipasi lembaga dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja DKPP ke depan dengan membuat mekanisme partisipasi lembaga yang lebih inklusif seperti forum konsultasi atau form pengaduan online.

8. Mendorong DKPP memperkuat sinergi dengan lembaga terkait seperti KPU, Bawaslu, dan penegak hukum untuk memastikan penegakan etika yang lebih efektif.

9. Komisi II DPR mendorong DKPP proaktif dalam mencegah pelanggaran etika sebelum terjadi dengan melakukan edukasi penyelenggara pemilu tentang kode etik, dan meningkatkan pengawasan preventif.

10. Mendorong DKPP untuk memaksimalkan sistem penerimaan pengaduan melalui elektronik, call center, dan email daripada datang langsung ke kantor DKPP.

belum masuk kepada ranah substansial.

"Memang kita sudah saatnya lah berpikir untuk membuat sistem, apapun sistem di dalam negara kita," kata dia. (din, rls, ist, ant/dya)

Dituding Tergesa Limpahkan Berkas Hasto ke Jaksa, **KPK Membantah**

BERAPA LAMA KASUS HASTO MASUK KE PENGADILAN USAI DILIMPALKAN KPK?

- Dalam Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHP termaktub mengenai aturan itu. Disebutkan bahwa jaksa penuntut umum memiliki waktu tujuh hari untuk meneliti berkas yang diserahkan penyidik.
- "Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum," tulis Pasal 138 ayat (1).
- Kemudian, dalam ayat (2) dijelaskan, jaksa penuntut umum bisa mengembalikan berkas perkara ke penyidik bila terdapat berkas yang tidak lengkap. Penyidik diberi waktu 14 hari untuk segera menyerahkan lagi berkas perkara tersebut ke jaksa penuntut umum.
- "Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum," bunyi ayat 2.
- Hasto diketahui sempat mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya, tapi gugatan itu tidak diterima hakim. Hasto lalu melakukan gugatan praperadilan jilid kedua. Gugatan keduanya itu masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Mengenai tersangka yang mengajukan gugatan praperadilan sebetulnya juga sudah termaktub di KUHP. Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d dijelaskan gugatan praperadilan bisa gugur jika sidang pokok perkara sudah dimulai. Berikut bunyinya:
- "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur," tulis Pasal 82 ayat (1) huruf d.

JEJAK BERLIKU PENAHANAN HASTO DI KASUS MASIKU

- Kasus Hasto bermula dari OTT KPK pada 8 Januari 2020 terkait suap PAW anggota DPR RI 2019-2024, Harun Masiku. KPK hendak menangkap Hasto dan Harun, tetapi keduanya lolos.
- Pada 2024, KPK kembali mengusut kasus ini dan memanggil sejumlah saksi, termasuk terpidana Wahyu Setiawan dan Tio.
- Hasto ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember 2024, setelah pimpinan KPK 2024-2025 dilantik. Ia diduga terlibat dalam menggagalkan OTT dengan mengarahkan Harun merendam ponsel serta melarikan diri.
- Hasto menggugat KPK melalui praperadilan di PN Jakarta Selatan, tetapi permohonannya ditolak hakim Djuyanto pada 13 Februari 2025. Ia lalu mengajukan dua praperadilan baru dengan sidang pertama dijadwalkan 3 Maret 2025.
- KPK memanggil Hasto sebagai tersangka pada 13 Februari 2025, tetapi ia meminta penundaan. Pada 20 Februari 2025, setelah diperiksa lebih dari 7 jam, KPK mengumumkan penahanannya selama 20 hari.

Berbagai sumber diolah



JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyelesaikan penyidikan kasus dugaan suap dan perintangannya proses penyidikan (obstruction of justice) dengan tersangka Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan.

Penyidik KPK melakukan Tahap II yaitu Pelimpahan Berkas Perkara, Tersangka, dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, Kamis (6/3/2025). Komisi anti-rasuah pun dinilai tergesa-gesa.

"Kalau dari KPK sendiri, dalam hal ini penyidik, pelaksanaan proses penyidikannya berjalan sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (6/3/2025).

Dia juga menegaskan bahwa proses penyidikan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) dan perintangannya penyidikan yang menjerat Hasto, hal berbeda dengan proses praperadilan yang tengah diajukan kubu Hasto.

"Pelimpahan tersangka serta barang bukti hari ini adalah merupakan hasil akhir proses penyidikan tersebut, karena jaksa penuntut umum sudah menyatakan berkas tersebut lengkap," ucap Tessa.

Tessa mengatakan, apabila penyidik mau terburu-buru untuk melakukan pelimpahan, dilakukan pada sidang praperadilan Hasto yang pertama.

Sementara itu, kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, mengatakan, pihaknya telah menolak pelimpahan ini dan meminta KPK untuk memeriksa ahli yang mereka ajukan untuk meringankan kasus ini.

Namun, kata Maqdir, KPK tidak mengindahkan permintaan tersebut, dan tetap melimpahkan kasus ini.

Dengan begitu, Hasto akan segera masuk ke pengadilan.

Dia menduga penuntut umum akan segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan agar permohonan praperadilan yang tengah mereka ajukan digugurkan oleh majelis hakim.

"Kalau ini memang betul mereka lakukan, ini adalah suatu bentuk pelecehan secara sengaja terhadap hukum," kata Maqdir kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).

Diketahui, Hasto tengah mengajukan dua permohonan praperadilan kasus siap dan perintangannya penyidikan yang menjeratnya.

Praperadilan ini diajukan setelah sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan Hasto yang pertama. Hasto harus kembali mengajukan praperadilan secara terpisah.

Sidang perdana praperadilan jilid dua Hasto, digelar Senin (3/3/2025) lalu. Namun, pihak KPK tidak hadir dan mengajukan penundaan, sehingga sidang ditunda hingga 10 Maret 2025 untuk perkara suap dan 14 Maret 2025 untuk perkara perintangannya penyidikan.

Namun, belum sampai pada sidang lanjutan, pihak KPK telah melimpahkan kasus Hasto ke penuntut umum.

Praperadilan Pekan Depan

Di sisi lain KPK, menyatakan bahwa akan tetap hadir dalam sidang gugatan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang rencananya bakal digelar pada 10 dan 14 Maret 2025 pekan depan.

"Kalau menurut pandangan saya Biro hukum tetap akan menghadiri.

Kecuali ada hal lainnya yang nanti kita bisa lihat sama-sama. Tapi akan tetap menghadiri dan akan mengikuti proses praperadilan yang tersebut," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.

Tessa belum bisa menampilkan terkait jawaban apa yang disiapkan tim biro hukum KPK untuk menghadapi sidang praperadilan Hasto Kristiyanto jilid II.

"Ya itu. Biro hukum kan meminta penundaan untuk mempersiapkan. Berdasarkan pengajuan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari saudara HK ya. Tapi isi materinya seperti apa saya masih belum bisa melihat," kata Tessa.

Jubir berlatar belakang polri itu, meminta publik bersama-sama menyaksikan sidang praperadilan Hasto Kristiyanto pekan depan.

Diketahui, Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah diproses hukum atas kasus dugaan tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto disebut juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Teruntuk Hasto, ia juga dikenakan Pasal perintangannya penyidikan atau obstruction of justice.

Hasto disebutkan bahwa telah membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lalu yang menasar Harun.

Ia diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri. Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK.

Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Hasto sudah berupaya untuk lepas dari status tersangka dengan mengajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Namun, usaha tersebut kandas.

Atas alasan itu, Hasto mengajukan dua permohonan Praperadilan pada Senin, 17 Februari 2025. (wid, rls, ist, ant/dya)

Tom Lembong Tak Kecipratan Duit Korupsi Impor Gula

Kejagung: Dia Untungkan Orang Lain

JAKARTA - Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, mengaku tidak menerima uang sepeser pun dari kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam dakwaan, jaksa memang me-mapkan ada 10 orang men-dapatkan keuntungan dalam perkara ini. Dan memangbtak ada nama Tom Lembong dalam daftar tersebut.

Kejaksanaan Agung (Kejagung) pun memberikan penjelasannya. Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Harli menyebutkan, di pasal itu seorang dapat dijerat korupsi, meski tidak mendapat keuntungan pribadi.

"Kan (dikenakan) Pasal 2, Pasal 3 (UU Tipikor). Ya menguntungkan orang, korporasi. Itu juga bisa dijerat," kata Harli di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).

Dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi importasi gula di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025), jaksa memaparkan, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) tanpa didasarkan rapat koordinasi dan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Persetujuan impor itu diberikan kepada 10 perusahaan gula swasta, yakni PT Angels Products, PT Makassar Tene, PT Sentra Usahatama Jaya, PT Medan Sugar Industry, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalán Furnindo, PT Duta Sugar International, PT Berkah Manis Makmur, PT Kebun Tebu Mas dan PT Dharmapala Usaha Sukses.

Jaksa menyebut total ada 21 surat persetujuan impor GKM yang dikeluarkan oleh Tom Lembong kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Izin itu, menyebabkan kemahalan harga yang dibayarkan PT PPI dalam pengadaan Gula Kristal Putih (GKP) untuk penugasan stabilisasi harga/operasi pasar. Selain itu menyebabkan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Kedua hal tersebut telah merugikan negara senilai Rp 515 miliar. Angka ini menjadi bagian kerugian negara berdasarkan audit nilainya mencapai Rp 578 miliar.

Selain itu, Tom juga disebut memberikan izin kepada PT Angels Products untuk mengimpor GKM dan mengolahnya menjadi gula kristal putih (GKP). Padahal, saat itu stok GKP dalam negeri mencukupi.

"Terdakwa Thomas Trikasih



Sidang perdana eks Menteri Perdagangan RI Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong terkait kasus dugaan korupsi importasi gula di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025). (ist)

Lembong tidak menunjuk Perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan menunjuk Induk Koperasi Kartika (INKOPKAR), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (PUSKOPOL), Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI-Polri," papar jaksa.

Kemudian, Tom Lembong juga disebut tidak mengendalikan distribusi gula tersebut. Di mana, distribusi gula itu seharusnya dilakukan melalui operasi pasar.

Perbuatan Tom Lembong disebut telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp 578 miliar. Atas perbuatannya, Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Dakwaan Dinilai Tak Akurat

Tom Lembong mengaku kecewa atas dakwaan jaksa penuntut umum terkait dugaan korupsi importasi gula yang menjerat dirinya. "Ya saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan," kata Tom saat ditemui awak media di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

Tom menilai, dalam surat dakwaan jaksa persoalan menyangkut dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara ini menjadi semakin tidak jelas. Sebab, jaksa tidak melampirkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut," tutur Tom.

Lebih lanjut, Tom berharap Kejaksaan Agung bersikap transparan dan profesional menyangkut persoalan kerugian negara dalam kasus ini. Selain itu, ia juga merasa uraian yang disampaikan jaksa terkait kronologi kasus tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

"Secara umum saya melihat dakwaan tidak mencerminkan dengan

akurat realita yang berlaku pada saat itu ya di saat masa-masa yang diperkarakan," kata Tom.

Sebelumnya, kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mengatakan kliennya tidak menerima uang sepeser pun di kasus dugaan korupsi impor gula. Ari menyebutkan jaksa bertindak sewenang-wenang terhadap Tom.

"Kami sangat prihatin bagaimana sebuah kekuasaan yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum, justru digunakan oleh penuntut umum secara sewenang untuk menghancurkan keadilan, seseorang yang seharusnya dilindungi," kata Ari Yusuf Amir saat membacakan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

Ari mengaku miris dengan dakwaan jaksa. Dia kembali mengatakan kliennya tidak menikmati uang sepeser pun dalam kasus tersebut.

"Majelis hakim yang terhormat, sungguh kami miris, Terdakwa disangka melakukan korupsi sementara satu rupiah pun, penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya aliran dana yang masuk ke Terdakwa baik secara langsung ataupun tidak langsung," ujarnya.

Dia mengatakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) telah menyatakan tak ada penyelewengan dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Dengan begitu, menurut dia, hasil audit itu menyatakan tidak ada kerugian negara.

Sementara itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang hadir dalam sidang mengapresiasi majelis hakim yang memberikan kesempatan pembacaan eksepsi Tom Lembong pada hari ini juga.

"Saya ingin sampaikan terima kasih kepada majelis hakim yang sudah memberikan kesempatan untuk eksepsi dibacakan hari ini juga, sehingga kita semua keluar dari persidangan hari ini mendengar

10 ORANG YANG MENDAPAT KEUNTUNGAN DALAM PERKARA INI

1. Tony Wijaya Ng (PT Angels Products) → Rp144,11 miliar (impor gula dengan INKOPKAR, INKOPPOL, PT PPI).
2. Then Surianto Eka Prasetyo (PT Makassar Tene) → Rp31,19 miliar (impor gula dengan INKOPPOL, PT PPI).
3. Hansen Setiawan (PT Sentra Usahatama Jaya) → Rp36,87 miliar (impor gula dengan INKOPPOL, PT PPI).
4. Indra Suryaningrat (PT Medan Sugar Industry) → Rp64,55 miliar (impor gula).
5. Eka Sapanca (PT Permata Dunia Sukses Utama) → Rp26,16 miliar (impor gula dengan INKOPPOL, PT PPI).
6. Wisnu Hendraningrat (PT Andalán Furnindo) → Rp42,87 miliar (impor gula dengan INKOPPOL, PT PPI).
7. Hendrogiarto A. Tiwow (PT Duta Sugar International) → Rp41,23 miliar (impor gula dengan PT PPI).
8. Hans Falita Hutama (PT Berkah Manis Makmur) → Rp74,58 miliar (impor gula dengan INKOPPOL, PT PPI, SKKP TNI-Polri/PUSKOPPOL).
9. Ali Sandjaja Boedidarmo (PT Kebun Tebu Mas) → Rp47,87 miliar (impor gula dengan PT PPI).
10. Ramakrishna Prasad Venkatesha Murthy (PT Dharmapala Usaha Sukses) → Rp5,97 miliar (impor gula dengan INKOPPOL).

secara lengkap, baik yang disampaikan oleh penuntut maupun disampaikan oleh penasihat hukum." kata Anies Baswedan usai menghadiri secara langsung sidang perdana Tom Lembong.

Anies mengungkap, dengan dibacakannya eksepsi Tom Lembong di hari ini, maka masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap.

"Dengan begitu, diharapkan masyarakat punya informasi yang lengkap. Kami sampaikan terima kasih kepada majelis hakim, karena hari ini juga (eksepsi) itu dibacakan," ungkap Anies. Ia berharap, majelis hakim mengambil keputusan dengan objektif, dengan prinsip kebenaran dan keadilan serta dengan prinsip kepastian hukum.

"Tentu kita berharap agar majelis hakim mengambil keputusan, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan objektif, prinsip kebenaran, prinsip kepastian hukum dan juga keadilan. Kami yakin majelis hakim akan mengambil keputusan seperti itu." ucapnya. (wid, ist, rls, ant, kcm/dya)

Menakar Visi Misi Kepala Daerah Malang Raya Akademisi: Warga Harus Aktif, Tagih Janji Kampanyenya



Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu, Nurochman-Heli Suyanto.
(dok. Prokopim Kota Batu)



Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin.
(Santi/Lenteratoday)



Bupati dan Wakil Bupati Malang, Sanusi-Lathifah Shohib.
(dok. Prokopim Kab Malang)

MALANG RAYA - Usai pelantikan kepala daerah, visi misi pun didengarkan ke warganya. Begitu pula di tiga wilayah Malang Raya, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.

Di tengah gagasan besar yang dianjurkan kepala daerah, pengawasan dari masyarakat dan akademisi menjadi faktor penting dalam memastikan realisasi program. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Brawijaya (UB), Andhyka Muttaqin, menyoroti minimnya peran partai politik dalam mengawasi kepala daerah setelah terpilih.

"Partai politik cenderung pasif setelah kandidatnya menang. Oleh karena itu, masyarakat harus aktif menagih janji kampanye agar kepala daerah tetap fokus menjalankan program," kata Andhyka, dikonfirmasi melalui sambungan selular, Kamis (6/3/2025).

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi warga dalam forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan audiensi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat juga dapat mengakses laporan kinerja kepala daerah melalui mekanisme Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Senada dengan Andhyka, Pakar Politik UB, Wawan Sobari, menyebut pengawasan berbasis digital dapat menjadi solusi efektif. "Harus ada portal transparansi publik yang dikelola lembaga independen dan masyarakat sipil untuk mencatat dan memantau janji kampanye kepala daerah," ungkapnya.

Namun, Wawan menyoroti belum ada inisiatif dari partai politik untuk membangun sistem pengawasan ini. "Seharusnya partai politik yang berperan, tapi kenyataannya tidak berjalan. Masyarakat sipil yang

akhirnya harus mengambil peran ini," tambahnya.

Wawan juga menyampaikan, dengan beragam program unggulan yang telah dirancang di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, harapan masyarakat akan perubahan dan pembangunan semakin besar. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, janji-janji politik tersebut berisiko menjadi sekadar retorika.

"Di satu sisi, kepala daerah berkomitmen untuk menunaikan visi dan misi mereka, tetapi di sisi lain, masyarakat harus tetap kritis dan aktif dalam menagih realisasi program. Makanya ini butuh partisipasi publik yang kuat, untuk program kerja dapat benar-benar terwujud," pungkash Wawan.

Kabupaten Malang Wujudkan Transformasi dan Keberlanjutan

Diketahui, Bupati Malang, Sanusi, dan Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, membawa visi 'Terwujudnya Kabupaten Malang yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan dengan Semangat Gotong Royong'. Visi ini dijabarkan dalam lima misi utama, yang meliputi transformasi sosial dan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, stabilitas sosial, serta pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.

Sanusi menegaskan, pencapaian visi ini membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. "Kami tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, DPRD, Forkopimda, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga rekan-rekan media," ujarnya, Kamis (6/3/2025).

Menurut Sanusi, di 2025 ini,

pihaknya akan berfokus pada penanganan infrastruktur jalan dan pembenahan sekolah rusak. Dua hal tersebut juga ditegaskan tidak akan terpengaruh oleh efisiensi anggaran yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat.

"Sementara ini kan tinggal sementara, menggunakan perencanaan anggaran lama. Program sesuai janji politik kami, baru dilakukan pada 2026," sambung pria yang akrab dengan sapaan Abah Sanusi ini.

Dasa Bakti Kota Malang

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dan Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menggagas program Dasa Bakti Unggulan dalam visi 'Menuju Malang Mbois dan Berkelas'.

Program ini terdiri dari sepuluh poin yang menggunakan bahasa walikan khas Malang, seperti Ngalam Pinter (pendidikan), Ngalam Tahes (kesehatan), hingga Ngalam Nyaman (infrastruktur dan lalu lintas).

Wahyu menegaskan, program ini didasarkan pada aspirasi masyarakat dan menargetkan berbagai sektor kehidupan, sesuai dengan janji-janji politiknya.

"Kami berkomitmen untuk merealisasikan seragam gratis, 1.000 event per tahun, beasiswa bagi 1.000 penerima setiap tahun, serta bantuan Rp 50 juta per RT. Khusus untuk bantuan Rp 50 juta, kami harus menyusun regulasinya dulu sehingga memungkinkan dapat terealisasi tahun depan,"katanya.

Persoalan krusial seperti kemacetan dan banjir juga masuk dalam prioritas program Dasa Bakti. Salah satunya adalah pembentukan Tim Sapu Lobang untuk perbaikan jalan serta Tim

Sedot Banyu untuk menangani banjir. "Kami ingin memastikan bahwa Kota Malang menjadi lebih nyaman dan layak huni,"tambahnya.

Mbatu SAE untuk Kota Wisata yang Berkelanjutan

Di Kota Batu, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Nurochman dan Heli Suyanto, mengusung visi Mbatu SAE, yang merupakan singkatan dari Madani, Berkelanjutan, Agrokreatif, Terpadu, Unggul, Sinergi, Akomodatif, dan Ekologis.

Untuk mewujudkan visi ini, keduanya merancang Nawa Bhakti Satya, yang merupakan sembilan misi utama yang mencakup peningkatan SDM, pemberdayaan UMKM, penguatan infrastruktur, pelestarian budaya, hingga perlindungan lingkungan.

"RPJMD akan kami tetapkan dalam enam bulan pertama untuk menjadi acuan pembangunan lima tahun ke depan," ujar Nurochman. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi jalannya pemerintahan agar kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi warga.

Tepat di 100 hari kepemimpinannya nanti, Nurochman mengatakan, membuka peluang kontrak kerja sama dengan oftaker dan buyer dari luar negeri untuk produk pertanian, menjadi salah satu fokusnya. Menurutnya, hal ini penting dilakukan karena selama ini pertanian Kota Batu turut menyumbang pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

"Ini bisa jadi langkah awal komitmen kami untuk mengubah sektor pertanian menjadi industri yang berdaya saing global. Nantinya, produk pertanian diupayakan naik kelas ke pasar ekspor," ungkapnya. (Santi/Dya)

Bom Jet Tempur Korsel Salah Sasaran, 15 Warga Luka

SEOUL - Sejumlah bom yang secara tidak sengaja dijatuhkan oleh jet tempur Korea Selatan (Korsel) di area sipil, ketika melakukan latihan militer pada Kamis (6/3/2025).

Bom tersebut dijatuhkan oleh jet tempur Korea Selatan dan menyebabkan kerusakan pada rumah warga dan sebuah gereja setempat. Jumlah korban luka akibat insiden ini meningkat menjadi 15 orang.

Dinas Pemadam Kebakaran Gyeonggi-do Bukbu, seperti dilansir Reuters dan AFP, Kamis (6/3/2025), melaporkan bahwa sedikitnya 15 orang mengalami luka-luka dalam insiden yang terjadi di area Pocheon tersebut. Dua korban luka di antaranya disebut mengalami luka parah.

Pocheon terletak sekitar 40 kilometer sebelah timur laut ibu kota Seoul dan berlokasi di dekat perbatasan dengan Korea Utara (Korut) yang dijaga ketat.

Angkatan Udara Korsel mengakui bahwa ada delapan bom jenis MK-82, masing-masing berbobot 500 pon, yang secara tidak sengaja dijatuhkan oleh sebuah jet tempur KF-16 yang sedang berpartisipasi dalam latihan tembak langsung di area tersebut. Bom-bom itu dijatuhkan di luar zona

latihan yang ditetapkan.

"Kami meminta maaf atas kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan penjatuhan (bom) yang tidak normal tersebut, dan kami berharap para korban luka mendapatkan kesembuhan cepat," demikian pernyataan Angkatan Udara Korsel.

Ditegaskan oleh Angkatan Udara Korsel bahwa pihaknya telah membentuk komite tanggap kecelakaan untuk menyelidiki lebih lanjut insiden tersebut. Angkatan Udara Korsel menyatakan pihaknya akan "mengambil semua langkah yang diperlukan, termasuk kompensasi atas kerusakan".

Laporan kantor berita Yonhap sebelumnya menyebut latihan tembak itu merupakan latihan gabungan dengan militer Amerika Serikat (AS).

Warga setempat telah memprotes gangguan dan potensi bahaya dari tempat pelatihan militer yang ada di dekat area itu selama bertahun-tahun.

Penduduk di area Pocheon, menurut laporan Yonhap, telah dievakuasi usai insiden itu terjadi, dengan otoritas setempat memeriksa apakah ada bom yang tidak meledak usai dijatuhkan secara tidak sengaja.

Dilaporkan sedikitnya dua rumah



Militer Korea Selatan dan Polisi berjaga di dekat mobil dan bangunan rusak setelah sebuah bom MK-82 jatuh di sebuah desa di Pocheon, Korea Selatan, Kamis (6/3/2025). (AFP)

dan sebuah gedung gereja mengalami kerusakan. Sejumlah foto yang diambil Reuters dari lokasi insiden menunjukkan jendela-jendela pecah dan puing-puing dari gedung gereja yang rusak berserakan di atas tanah.

Warga Sebut Bom yang Jatuh dari Jet Tempur Bagaikan Petir

Salah satu penduduk setempat, yang bermarga Park, mengatakan kepada Yonhap bahwa dirinya sedang menonton televisi di rumahnya ketika insiden itu terjadi.

"Saya tiba-tiba mendengar suara

ledakan besar, seperti petir, dan seluruh rumah berguncang. Saat saya keluar, semuanya kacau," tuturnya, seperti dilansir AFP.

Sebuah panti jompo yang berjarak sekitar satu kilometer dari lokasi insiden itu juga turut merasakan dampaknya. "Sebuah ledakan tiba-tiba mengguncang gedung. Kaca-kaca jendela pecah, dan salah satu guru kami terluka dan dibawa ke rumah sakit," ucap direktur panti jompo tersebut, yang bermarga Yu. (AFP, Reuters, Yonhap, ist/nei)

Trump Siap **Bubarkan** Kementerian Pendidikan AS



Presiden Donald Trump menyampaikan pidato di hadapan sidang gabungan Kongres di Capitol di Washington, (AP)

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump segera menekan kapres pembubaran Kementerian Pendidikan. Laporan itu diungkap media Wall Street Journal (WSJ) pada Rabu (5/3/2025).

Mengutip seorang sumber dekat di Pemerintah AS, WSJ melaporkan kepres pembubaran paling cepat diteken pada Kamis (6/3/2025) waktu setempat.

Terkait laporan WSJ baik Kementerian Pendidikan dan Gedung Putih belum memberikan komentar.

Adapun Trump berulang kali

menyatakan keinginan membubarkan Kementerian Pendidikan. Sejatinya Trump menginginkan pembubaran Kementerian Pendidikan pada periode pertama pemerintahannya. Usulan Trump ketika itu tidak disepakati kongres.

Pada periode kedua ini Trump mengkritik keras Kementerian Pendidikan. Politikus Partai Republik itu menyebut kementerian itu sebagai penipu besar.

Kini, rencana Trump sedikit lagi terwujud. Menteri Pendidikan Linda McMahon sudah sepakat menutup kementerian yang dipimpinya itu.

McMahon bahkan membantu lobi pembubaran ke Kongres AS. Dibutuhkan persetujuan kongres untuk pembubaran tersebut.

McMahon pun berjanji meski dibubarkan pendanaan federal bagi sekolah serta bantuan untuk siswa miskin akan berlanjut.

Kementerian Pendidikan AS memiliki wewenang mengawasi 100

ribu sekolah negeri dan 34 ribu sekolah swasta. Mereka turut pula mengawasi dana pinjaman pendidikan senilai USD 1.6 triliun.

Kualitas Murid Buruk

Salah satu alasannya adalah efisiensi. Departemen Pendidikan AS menjadi sasaran Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE) yang dikomandani dedengkot bos teknologi Elon Musk. DOGE mendorong pemangkasan program dan pegawai federal di berbagai departemen di seluruh pemerintahan, termasuk Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) yang telah berusia 60-an tahun.

"Sebuah tim DOGE diketahui telah bekerja di Departemen Pendidikan pada hari Senin (3/2/2025) untuk melaksanakan perintah eksekutif dan agenda Trump," kata juru bicara Departemen Pendidikan AS Madison Biedermann dilansir dari AP, Rabu (5/2/2025).

Departemen Pendidikan telah menjadi target utama Trump. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan perintah eksekutif yang diharapkan akan dikeluarkan akhir Februari 2025 akan mengarahkan Menteri

Pendidikan untuk bekerja menutup departemen tersebut. Trump mengatakan bahwa tinjauan selama 90 hari akan dilakukan untuk menguraikan rencana dan masukan Kongres akan dicari.

"Kami menghabiskan lebih banyak biaya per murid daripada negara lain di dunia, dan peringkat kami berada di urutan paling bawah. Peringkat kami sangat buruk," kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval pada hari Selasa (4/2/2025) dilansir dari Reuters, Rabu (5/2/2025).

Selain itu pemerintahan Trump sangat kontra dengan keberagaman, kesetaraan dan inklusi (Diversity, Equity, Inclusion/DEI). Dia mencabut perintah eksekutif yang telah mempromosikan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) dan mempromosikan hak-hak bagi orang-orang LGBTQ+ dan ras minoritas.

Saat kampanye, Trump berulang kali menunjuk Departemen Pendidikan semakin jauh dari jangkauan federal dan mengaitkannya dengan masalah perang budaya. Menurut Trump, Departemen Pendidikan AS telah disusupi oleh 'para radikal, fanatik, dan Marxis'. (WSJ, AP, Reuters, ist/nei)



Waspada Penyakit Ini Bisa Ditularkan Melalui Air

SELAMA puasa Ramadan, tubuh lebih rentan mengalami dehidrasi karena kurangnya asupan makanan dan minuman selama kurang lebih 14 jam. Dehidrasi ini dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan kehilangan kelembabannya.

Menurut Beauty Bar, gangguan tidur atau kurang tidur selama puasa juga dapat meningkatkan kadar kortisol. Akibatnya, fungsi skin barrier terganggu dan kulit semakin dehidrasi. Untungnya, kulit kering bukan masalah mutlak yang tak bisa diatasi.

Dengan mengubah kebiasaan dan melakukan perawatan, kulitmu dijamin tetap sehat selama berpuasa. Yuk, simak cara mengatasi kulit kering saat puasa dalam artikel ini.

Cara Mengatasi Kulit Kering Saat Puasa

Merujuk laman Eucerin dan Al Arabiya News, berikut tips menjaga kulit tetap lembap selama bulan Ramadan.

Penuhi hidrasi tubuh saat sahur dan berbuka

Jagalah kesegaran dan kelembapan kulitmu dengan mengonsumsi banyak cairan saat momen berbuka dan sahur. Disarankan untuk minum secara berkala dengan minimal 8 gelas per hari.

Selain itu, hindari minuman bersoda, minuman dengan kandungan gula tinggi, serta kafein. Pilihlah makanan dengan kandungan air tinggi. Kamu juga bisa mengonsumsi air yang dicampur mentimun, daun mint, atau lemon. Racikan tersebut dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral untuk menjaga kulit tetap berseri.

Makan makanan yang membuat kulit bersinar

Mengonsumsi makanan yang kaya serat dan antioksidan dapat membantu kulit tetap sehat dan lembap. Contohnya seperti buah berry, kacang almond, cokelat hitam, dan delima.

Disarankan pula untuk mengonsumsi makanan yang ramah untuk kulit, seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, dan teh herbal saat buka puasa agar kulit tampak berseri.

Pakai skin care

Kulit juga butuh skin care untuk menambah nutrisi dan kelembapan dari luar. Jadi, gunakanlah moisturizer yang teksturnya berupa cream, agar kulitmu mendapatkan hidrasi maksimal.

Selain itu, lakukan eksfoliasi untuk menjaga kulit tetap bersih maksimal. Jangan lupa untuk menggunakan sunscreen, karena paparan sinar matahari dapat membuat kulit semakin kering dan merusak produksi kolagen serta elastin.

Jangan terlalu sering mencuci wajah

Meskipun penting untuk tetap terhidrasi selama berpuasa, tapi jangan mencuci wajah terlalu sering. Sebab, hal ini dapat membuat minyak alami kulit hilang, dan akibatnya kulit jadi makin kering serta iritasi.

Kalau kamu merasa kulit terlalu kering dan butuh cairan, gunakan face mist yang mengandung vitamin serta antioksidan. Dengan begitu, kulit akan ternutrisi tanpa kehilangan minyak alaminya.

Hindari makeup tebal

Menggunakan makeup yang tebal

dapat menyumbat pori-pori dan menyebabkan kulit kering serta dehidrasi. Jadi, sebaiknya gunakan makeup yang ringan selama bulan puasa.

Selain itu, cobalah beralih pada produk-produk makeup yang mengandung bahan menghidrasi, seperti glycerin, hyaluronic acid, dan aloe vera. Jadi, kulit bisa tetap terjaga kelembabannya meski ditimpa makeup seharian.

Batasi waktu mandi

Hindari mandi dengan air hangat dan batasi waktu mandi. Mandi yang terlalu lama atau berendam dan air panas dapat menghilangkan minyak alami kulit. Batasi mandi tidak lebih dari sekali sehari dan tidak lebih dari 5-10 menit. Saat mandi, disarankan untuk menggunakan body wash yang lembut dan bebas pewangi. Hindari penggunaan terlalu banyak, apalagi sampai busanya melimpah. Setelah itu, keringkan kulit dengan handuk yang lembut untuk menghindari goresan pada kulit badan.

Cukupi Kebutuhan Cairan

Dehidrasi adalah salah satu penyebab utama kulit kering selama puasa. Oleh karena itu, penting untuk memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan minum cukup air saat sahur dan berbuka.

Tidak hanya air putih, kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air, seperti semangka, melon, dan mentimun, untuk membantu menjaga kelembapan kulit dari dalam.

Penyebab Kulit Kering saat Puasa

Selama bulan puasa, terkadang

kondisi kulit berubah menjadi kering. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan perubahan pola makan dan gaya hidup selama berpuasa.

BEBERAPA PENYEBAB UTAMA KULIT KERING SAAT PUASA DI ANTARANYA:

Kekurangan Cairan (Dehidrasi)

Saat berpuasa, tubuh tidak menerima asupan cairan selama beberapa jam. Kondisi ini dapat menyebabkan dehidrasi, yang berdampak langsung pada kelembapan kulit, membuatnya tampak kering dan kusam.

Perubahan Pola Tidur

Selama bulan puasa, jam tidur seringkali berkurang atau berubah, terutama karena aktivitas sahur dan ibadah malam. Kurang tidur dapat mengganggu proses regenerasi kulit, sehingga kulit menjadi kering dan kurang bercahaya.

Konsumsi Makanan Tidak Sehat

Makanan yang digoreng dan tinggi lemak sering menjadi pilihan saat berbuka puasa. Namun, konsumsi berlebihan makanan tersebut dapat memicu peradangan dan mengurangi kelembapan kulit, sehingga kulit menjadi kering dan rentan terhadap masalah lainnya.

Hal ini menyebabkan kulit kehilangan kelembabannya dan menjadi kering. Untuk menjaga kesehatan kulit selama puasa, penting untuk memastikan asupan cairan yang cukup saat sahur dan berbuka, menjaga pola tidur yang baik, mengonsumsi makanan sehat. (nei,ist/dya)

QJMOTOR SRV 250 AMT dan FORT 250

Sensasi Berkendara Maksimal!

QJMOTOR akhirnya resmi hadir di Indonesia dengan memboyong empat motor cc besar andalannya yakni, motor sport 4-silinder SRK 800 RR, cruiser SRV 600 V, cruiser otomatis SRV 250 AMT, serta skuter matik FORT 250.

Kedua motor ini menawarkan sensasi berkendara dan juga peruntukan yang berbeda. Keduanya menawarkan teknologi dan desain yang sesuai dengan kebutuhan pengendara masa kini.

SRV 250 AMT: Cruiser matik dengan sensasi manual

Bagi pengendara yang biasa menggunakan motor matik dan ingin mencoba sesuatu yang baru tanpa mengorbankan kenyamanan, QJMOTOR SRV 250 AMT adalah pilihan yang sangat tepat.

Cruiser bermesin V-Twin Dual Cylinder ini menawarkan konsep motor matik dengan desain yang lebih gahar dan modern, memberikan kesan "sanggar" yang lebih berani di jalan.

Salah satu fitur utama dari motor ini adalah penggunaan teknologi AMT (Automatic Manual Transmission) yang memberikan pengalaman berbeda bagi pengendara motor matik.

AMT sendiri adalah sistem transmisi otomatis yang memungkinkan pengendara merasakan sensasi perpindahan gigi seperti motor manual, namun tanpa perlu memindahkan kopling secara konvensional.

Fitur AMT sendiri tersedia dalam dua mode, yakni manual dan otomatis. Mode manual memungkinkan pengendara memindahkan gigi secara manual melalui jari di sisi kiri stang. Namun, perpindahan gigi mundur tetap terjadi secara otomatis bila kecepatan menurun.

Meski terdengar rumit, fitur ini

sangat mudah dioperasikan. Pengendara yang terbiasa dengan motor matik pun bisa dengan mudah untuk beradaptasi dengan teknologi ini, tak terkecuali bagi wanita, seperti penulis yang juga tidak lancar mengendarai motor kopling konvensional.

Tak perlu waktu lama bagi penulis untuk beradaptasi mengendarai motor ini, hanya dalam sekali penjelasan dari instruktur berkendara penulis dapat dengan lancar menggeber motor ini dan tentunya, SRV 250 AMT berhasil memberikan pengalaman berkendara yang amat menyenangkan.

Meski otomatis, sensasi "sentakan" perpindahan gigi tetap terasa, memberikan pengalaman berkendara yang seru, terutama bagi pengendara yang sebelumnya terbiasa dengan motor manual.

Hal ini menjadi keunggulan tersendiri karena meskipun motor ini termasuk dalam kategori matik, pengendara tetap bisa menikmati nuansa berbeda yang lebih sporty dan bertenaga. Ditambah lagi penampilan motor ini yang memikat mata pengguna jalan lainnya, mereka mungkin tidak berfikir bahwa motor ini bertransmisi otomatis.

FORT 250: Skutik harian bertenaga

QJMOTOR FORT 250 merupakan skutik matik (skutik) yang menawarkan desain dan tenaga yang lebih besar di kelasnya.

Jika SRV 250 AMT lebih cocok untuk pengendara yang ingin merasakan motor matik dengan sensasi manual meski dapat juga digunakan harian, FORT 250 menawarkan pengalaman berkendara yang lebih bertenaga dan lincah untuk

penggunaan harian dan mobilitas sehari-hari, dengan transmisi otomatis layaknya skutik matik.

Dibekali mesin 250cc, skutik yang akan bersaing dengan Yamaha Xmax ini menawarkan tenaga yang cukup besar untuk digunakan dalam berbagai situasi.

Dengan bodinya yang cukup besar dan kokoh untuk sebuah skutik, FORT 250 sangat nyaman dikendarai. Posisi duduk yang lebih tinggi dan body yang lebih besar membuat motor ini lebih stabil dan memberikan rasa aman saat melaju di jalanan dengan kecepatan tinggi.

Salah satu keunggulan utama dari FORT 250 adalah kenyamanan yang ditawarkannya. Motor ini memiliki handling yang ringan dan mudah dikendalikan.

Desain ergonomis pada jok dan posisi setang memberikan kenyamanan lebih, sehingga pengendara tidak cepat lelah meski digunakan untuk perjalanan jauh sekalipun.

FORT 250 juga memiliki

suspensi yang cukup mumpuni untuk menyerap guncangan, memberikan pengalaman berkendara yang halus meski melintasi jalanan yang kurang mulus.

Di sektor performa, FORT 250 hadir dengan mesin 250cc yang sangat bertenaga. Motor ini menawarkan akselerasi yang cepat dan responsif, menjadikannya pilihan tepat bagi mereka yang mencari skutik dengan performa tinggi namun tetap nyaman untuk digunakan sehari-hari.

Dengan kapasitas mesin yang besar, FORT 250 mampu menempuh jarak jauh dengan kecepatan yang stabil, cocok bagi pengendara yang sering melakukan perjalanan jauh.

Secara desain, FORT 250 terlihat sporty dan agresif, memberikan kesan kuat dan tangguh di jalanan. Bodi

motor yang besar dan kokoh dipadukan dengan lampu depan LED modern, serta garis-garis tajam yang mempertegas karakter sporty-nya. (nei,ist/dya)



SRV 250 AMT



HARIAN **LENTERA**
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Pegunungan Jayawijaya Papua Salju Abadi di Puncak Carstensz

PAPUA menyimpan berbagai destinasi tempat wisata menarik dan menantang untuk dikunjungi. Salah satunya yaitu Puncak Jayawijaya yang merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Ketinggiannya yang mencapai 4.884 mdpl ini membuat salju abadi menyelimuti puncak gunung di provinsi Papua ini.

Namun karena terjadinya pemanasan global, salju abadi Puncak Jayawijaya kini mulai menyusut. Bahkan diperkirakan akan mengering. Berbagai rintangan yang ada pada gunung ini tentunya menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pendaki sejati.

Daya Tarik Wisata Puncak Jayawijaya

Wisata Puncak Jayawijaya memberikan pesona keindahan alam yang unik dan spektakuler. Keberadaan salju tebal di puncaknya menjadi salah satu keistimewaan gunung ini.

Gunung ini juga merupakan gunung paling tinggi di Indonesia. Jalur pendakian yang cukup ekstrim sekaligus menantang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki di Indonesia maupun di seluruh dunia. Supaya ketika mendaki dapat lebih aman dan menyenangkan, maka dapat menggunakan jasa tour guide Indonesia. Dengan didampingi jasa tour guide tersebut, maka petualangan mendaki akan semakin berkesan.

Akomodasi dan Fasilitas yang Disediakan

Lokasi menuju ke Puncak Jayawijaya masih terbilang alami dan jalurnya cukup ekstrem untuk dilalui. Maka dari itu, akomodasi beserta fasilitas yang disediakan pun juga sangat

minim. Para pendaki hanya dapat memperoleh satu akomodasi penginapan yang tersedia pada jalur pendakian yaitu basecamp.

Sesuai dari basecamp tersebut, para pendaki hanya bisa menggunakan tenda sebagai tempat untuk menginap. Bagi pendaki yang berminat menggunakan fasilitas transportasi juga tersedia dan ditawarkan oleh jasa agen perjalanan.

Selain itu, bagi setiap pendaki yang memakai jasa transportasi juga dapat menikmati fasilitas tambahan yang diberikan. Fasilitas tersebut biasanya berupa asuransi, jasa pemandu wisata Papua, dan pelatihan singkat sebelum memulai pendakian.

Akses Lokasi Wisata Puncak Jayawijaya

Wisata Puncak Jayawijaya berlokasi di Papua, yang tepatnya berada di pegunungan Barisan Sudirman Jayawijaya. Gunung ini merupakan salah satu objek wisata yang jalurnya sangat ekstrem untuk dilalui. Bahkan beberapa waktu tertentu terdapat suatu permasalahan sehingga membuatnya tidak bisa didaki. Mengingat jalur pendakian yang berbahaya dan terjal, sebagian besar pendaki menggunakan jasa agen perjalanan. Selain itu juga bisa

menggunakan jasa tour guide Papua. Supaya aktivitas petualangan mendaki dapat lebih aman, nyaman, dan menyenangkan.

Pendakian yang Menantang

Bagi para pendaki, menduduki Puncak Jaya adalah mimpi yang sangat didambakan. Rute pendakian yang sulit dan medan yang ekstrem menjadikan perjalanan ini menjadi tantangan yang memerlukan persiapan fisik dan mental yang matang. Namun, semua usaha dan kerja keras ini akan terbayar ketika Anda mencapai puncak dan disuguhkan pemandangan yang begitu spektakuler.

Keindahan Alam yang Menakutkan

Selain puncaknya yang berselimut salju, Pegunungan Jaya Wijaya juga menawarkan keindahan alam lain yang tak kalah mempesona. Lembah-lembah yang dalam, tebing-tebing curam, serta hutan-hutan tropis yang lebat menjadikan kawasan ini surga bagi para pecinta alam. Flora dan fauna endemik yang hidup di sekitar pegunungan ini menambah kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia.

Budaya dan Sejarah

Pegunungan Jaya Wijaya juga

memiliki nilai budaya dan sejarah yang penting. Wilayah ini dihuni oleh berbagai suku asli Papua yang memiliki tradisi dan budaya yang kaya. Mereka hidup harmonis dengan alam sekitar dan menjaga kelestarian lingkungan dengan bijak. Berinteraksi dengan masyarakat setempat memberikan pengalaman yang tak terlupakan dan pemahaman yang lebih dalam tentang kekayaan budaya Papua.

Gunung tertinggi di Indonesia dan benua Australia

Mengutip p2k.unkris.ac.id, dengan ketinggian puncaknya yang mencapai 4.884 meter dari permukaan laut, gunung ini menjadi gunung tertinggi di Indonesia dan gunung tertinggi di benua Australia. Selain itu, Gunung Jaya Wijaya juga menempati urutan ke-2 setelah gunung Hkakabo Razi

Asal mula nama Carstensz

Nama Carstensz diambil dari cerita sejarah pada 1623 ketika pelaut Belanda, Jan Carstensz melihat puncak tersebut melalui teropong dalam pelayarannya melintasi pantai selatan Laut Arafura. Kala itu, Jan Carstensz disebut pembohong bahkan dinilai gila ketika mengaku menemukan Gunung Carstensz Pyramid yang dilapisi salju di Indonesia. (nei,ist/dya)



Polah Raja Juli Disoroti ... (dari Hal 1)

UPAYA untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK) demi sehatnya udara Indonesia dan dunia, ditempuh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dengan membentuk Tim Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Kejutannya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, menarik 11 kader parpol berlogo mawar merah itu.

Informasi ini langsung viral di jagat media sosial (medsos) X, dulu Twitter. Sebut saja akun @Anak_Ogi, mengunggah Kepmen Kehutanan No 32/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 234/2024 tentang Struktur Organisasi Operation Management Office Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Dalam Kepmen ini, sekitar 11 nama yang diduga kader PSI masuk dalam tim FOLU Net Sink 2030. Mereka adalah: Yakni Andy Budiman menjabat Dewan Penasehat; Kokok Dirgantoro sebagai anggota bidang Pengelolaan Hutan Lestari; Endika Fitra Wijaya sebagai Staf Kesekretariatan bidang Pengelolaan Hutan Lestari.

Sigit Widodo sebagai anggota bidang Peningkatan Cadangan Karbon; Rama Hadi Prasetya sebagai Staf Kesekretariatan Peningkatan Cadangan Karbon; Furgan Amini Chaniago sebagai anggota bidang Konservasi; Nandya Maharani Irawan sebagai Staf Kesekretariatan bidang Konservasi.

Nama lainnya adalah, Andi Syaiful Oeding dan Yus Ariyanto sebagai anggota bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut; Nurtanti sebagai anggota bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas.

Khusus Raja Juli, menyandang jabatan tertinggi yakni Penanggung Jawab/Pengarah Tim FOLU Net Sink 2030. Beleid ini mengatur honor bulanan.

Penghasilan terbesar menjad jatah Penanggung Jawab/Pengarah senilai Rp50 juta/bulan. Sedangkan untuk anggota dan staf kesekretariatan masing-masing nilainya Rp20 juta/bulan, dan Rp8 juta/bulan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membenarkan soal Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Di dalam struktur pengurus, banyak kader PSI.

Hal ini tertuang dalam salinan SK Menteri Kehutanan No. 32 per tanggal

31 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.234 tahun 2024.

"Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat," kata Raja dalam keterangannya, Kamis (6/3/2025).

FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030.

Kebijakan ini lahir sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK serta mengendalikan perubahan iklim yang terjadi beserta dampaknya.

Indonesia's FOLU Net Sink 2030 diamanatkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Sementara itu Raja Juli menyampaikan revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya.

Ia juga menjelaskan OMO terdiri dari ASN, mantan ASN dan pihak eksternal yang dapat membantu Kementerian untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.

"Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut, sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN," ucap Raja Juli yang merupakar kader PSI itu.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengkhawatirkan masuknya figur-figur yang dekat dengan kekuasaan dalam struktur organisasi lembaga tertentu, termasuk OMO FOLU, dapat berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat.

"Saya melihat ini bisa memunculkan conflict of interest. Kebijakan yang dihasilkan nantinya justru lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas," ujar Trubus, Kamis (6/3/2025).

Ia menegaskan bahwa jabatan tertentu sebaiknya diisi oleh profesional yang memiliki kompetensi di bidangnya, bukan oleh politisi atau pengusaha.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa praktik nepotisme masih

terjadi di Indonesia."Situasi ini perlu dievaluasi atau bahkan dibatalkan karena berpotensi mencerminkan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN)," tegasnya.

Kena Community Notes

Raja Juli saat ini juga tengah menjadi bahan pembicaraan publik di media sosial X. Bukan tanpa sebab, Raja Juli Antoni rupanya mengkritik isi ceramah yang disampaikan Anies Baswedan saat menjadi pembicara di Masjid Kampus Universtas Gadjah Mada (UGM).

Melalui akun X miliknya, Raja Juli Antoni mengunggah tautan berita Suara.com yang berisi salah satu materi yang dibawakan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Raja Juli Antoni menilai bahwa isi materi Anies Baswedan memiliki muatan politik dan tidak seharusnya disampaikan di dalam masjid.

"Masjid tempat ibadah (tanda silang). Masjid tempat sindir politik (tanda centang). Ceramah Penuh Sindiran Dari Anies Baswedan di Masjid Kampus UGM," tulis Raja Juli Antoni Rabu (5/2/2025).

Usai menyenggol Anies Baswedan, cuitan tersebut mendapat Community Notes dari X. Menurut laman resmi X, Community Notes atau Catatan Komunitas adalah salah satu fitur X yang memberdayakan pengguna di platform tersebut untuk secara kolaboratif menambahkan konteks ke postingan yang berpotensi menyesatkan.

Community Notes tidak mewakili sudut pandang X dan tidak dapat diedit atau dimodifikasi oleh tim X. Postingan dengan Community Notes tidak akan diberi label, dihapus, atau ditangani oleh X kecuali jika ditemukan melanggar aturan X atau kebijakan privasi.

Pada bagian bawah cuitan milik Raja Juli Antoni, terdapat keterangan yang berbunyi, "Pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi memiliki peran multifungsi yang sangat strategis, termasuk dalam kegiatan berpolitik."

Unggahan tersebut kemudian menuai beragam komentar dari pengguna X lainnya. Mayoritas warganet mempertanyakan peran Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan yang seharusnya tidak mencuitkan hal-hal di luar tugasnya sebagai menteri.

"Look at that Community Notes. Alumni pondok pesantren dan IAIN nggak mungkin nggak tau bahwa masjid itu multifungsi, termasuk berpolitik dan menentang kezaliman penguasa," komentar @tangg*****

"Saya baru tau ternyata menteri sekarang merangkap jabatan jadi buzzer juga. Berarti dalam hal ini Raja

Juli nonton full juga ceramahnya Abah Anies. Katanya udah bukan Pemilu? Kok masih nganggap Abah Anies lawan politik? Bukannya beliau sekarang udah warga nganggur biasa ya," tambah @yasmi*****

"Udah jadi pejabat, masih aja mikirin Anies. Lo kerja yang bener," sahut @hukum***

"Kalau udah jadi menteri tuh kirain udah nggak boleh ngetweet yang nggak ada hubungan sama kinerja bidangnya karena bakal malumuin sekementerian, ternyata bebas aja," timpal @mard***

"Kalau ada satu hal yang perlu diapresiasi dari Twitter era Elon: Ada Community Notes. Menteri kena Community Notes karena keasbunannya," sambung @ama**_**

"Udah jadi menteri, masih aja nyinyir. Heran, tuh komentarin banjir Bekasi atau minimal kasih edukasi ke masyarakat soal kehutanan," ujar @irsala***

Sindiran juga diberikan aktivis lingkungan dan juga jurnalis Dandhy Laksono. Dalam komentarnya, Dandhy menyebut bahwa kantor Kemenhut justru saat ini tidak bisa diandalkan.

Dandhy tidak mempermasalahkan Anies Baswedan berbicara politik di masjid kampus UGM. Sebab, itu kerap dilakukan oleh tokoh lainnya.

"Seperti Salman ITB, masjid UGM sering bikin kajian sosial-politik. Ceramah di beberapa gereja di Flores atau Papua isinya juga nyindir rezim yang proyeknya mengancam umat," cetus Dandhy.

Dandhy justru menyebut, kantor Kemenhut yang dipimpin Raja Juli saat ini tidak bisa diandalkan.

"Kenapa di tempat ibadah? Karena kantor Kementerian Kehutanan gak bisa diandalkan atau jadi biang masalah," ujar Dandy.

Sebelum, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menerbitkan catatan rapor kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan hasil evaluasi yang diterbitkan CELIOS, ada lima menteri di Kabinet Merah Putih yang dinilai perlu diganti atau reshuffle. Salah satunya adalah Raja Juli.

Sebanyak 36 persen responden menilai Raja Juli tak terlihat bekerja selama 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Raja Juli juga jadi menteri dengan skor terendah dalam evaluasi kinerja energi dan lingkungan hidup versi CELIOS dengan nilai -45.

Skor ini menampilkan kemunduran dalam pengelolaan konservasi hutan terutama wacana untuk program ketahanan pangan dan transisi energi yang berisiko tinggi meningkatkan deforestasi.(wid, rls, ist, kcm, ant/dya)

Setelah Sritex, Pabrik Sepatu Nike dan Adidas PHK 3.500 Karyawan

JAKARTA-Kabar buruk pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali menyeruak. Setelah dihebohkan kasus pailit PT Sri Rejeki Isman (Sritex), giliran dua pabrik sepatu di Tangerang merumahkan sekitar 3.500 karyawannya.

Dua perusahaan yang melakukan PHK karyawan dalam jumlah besar itu adalah PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh. PT Adis Dimension Footwear diketahui merupakan produsen sepatu olahraga merek ternama, Nike. Sedangkan PT Victory Ching Luh adalah produsen sepatu brand Adidas dan Reebok.

"Ada 2 perusahaan di Tangerang, pertama PT Adis Dimension Footwear itu mengerjakan kalau gak salah sepatu Nike kelihatannya itu mem PHK 1.500 karyawan kemudian PT Victory Chingluh Indonesia sekitar 2.000 masih dalam proses, jadi kurang lebih 3.500 karyawan," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi, Kamis (6/3/2025).

Dia menerangkan, keduanya masih memproses PHK bulan ini. Adapun, alasan utamanya dipicu penurunan permintaan ekspor.

Berdasarkan catatan, beberapa tahun lalu PT Victory Chingluh juga telah melakukan PHK ribuan buruhnya. Kala itu, PT Victory Chingluh Indonesia masih didera krisis akibat imbas pandemi dan kelesuan ekspor. Hal tersebut berimbas pada 1.000-5.000 karyawan yang ter PHK secara bertahap.

Pada hal, semula, PT Victory Chingluh Indonesia mengaku memiliki lebih dari 10.000 karyawan dan didirikan oleh Shu Ching Luh pada 1969 lalu.

Tidak hanya alas kaki, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) juga kembali didera kabar penutupan pabrik. Asosiasi Produsen Benang dan Serat Indonesia (APSyFI) kembali mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan penyelamatan



(Ilustrasi) PT Adis Dimension Footwear (produsen sepatu merk Nike) dan PT Victory Ching Luh (brand Adidas dan Reebok) akan PHK sekitar 3.500 karyawannya. (Dok)

industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Terlebih, awal tahun ini tak hanya Sritex yang menutup operasional pabriknya. Ketua APSyFI Redma G. Wirawasta mengatakan, setidaknya terdapat dua pabrik TPT lainnya yang disebut dalam tekanan dan terancam tutup. Kendati demikian, pihaknya belum dapat membeberkan informasi kedua perusahaan tersebut.

"Di bulan Februari ini kan ada dua perusahaan lagi yang tutup selain Sritex, dan ini akan terus terjadi kalau pemerintah tidak ambil tindakan," kata Redma.

Pada hal, menurut Redma, masalah utama yang tengah dihadapi industri TPT saat ini banjir produk impor murah di pasar domestik. Selama ini, APSyFI juga telah berulang kali mengusulkan untuk terus meberantas impor ilegal dan mengendalikan impor ilegal.

Gegara Tak Ada Order

Sementara itu, dalam keterangan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Septo Kalnadi mengungkapkan biang kerok utama PHK massal yang terjadi.

Septo menyatakan penurunan pesanan dari pemegang merek

menjadi faktor utama yang memaksa kedua perusahaan tersebut mengurangi volume produksi. Hal ini diperkuat dengan keterangan bahwa salah satu perusahaan selama ini memasok beberapa seri sepatu untuk merek ternama seperti Nike.

"Order dari pemegang merek yang kurang sehingga mereka tidak mendapatkan order. Tidak mendapatkan order sehingga kan dari order itu mereka akan melakukan PHK," ungkap Septo.

Dari data yang dihimpun, Septo menjelaskan PT Adis Dimension Footwear telah melakukan PHK terhadap 1.500 karyawannya. Sementara, PT Victory Ching Luh sedang dalam proses PHK terhadap 2.000 karyawan.

Dilansir dari laman resminya, PT Adis Dimension Footwear adalah pabrik alas kaki premium dengan pengalaman total lebih dari 35 tahun keahlian teknis untuk menghasilkan produk-produk unggulan bermerek di dunia.

Pabriknya berlokasi di lahan seluas 23 hektare di Balaraja, Tangerang, Indonesia. Adis Dimension berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang bereputasi baik dan berkelanjutan dengan berinvestasi pada sumber daya manusia dan teknologi canggih.

Dalam catatan pemberitaan, pabrik yang satu ini menjadi salah satu basis produksi sepatu Nike di dunia. Adis Dimension Footwear di medio 2015 lalu mampu produksi sepatu Nike sebanyak 12 juta pasang per tahun.

PT ADF sudah berdiri sejak 1989 mendapatkan lisensi oleh buyer atau pemegang merek Nike untuk memproduksi sepatu berbagai tipe dan varian.

Pabrik yang kedua melakukan PHK massal adalah PT Victory Ching Luh. Dilansir dari laman resminya, Ching Luh adalah Merupakan perusahaan PMA Taiwan yang bergerak dibidang pembuatan sepatu dengan brand terkenal dan berlokasi di Pasar Kemis Tangerang.

Grup Ching Luh sendiri didirikan pada tahun 1969 oleh Su Ching Luh. Sejak didirikan hampir 50 tahun yang lalu, Ching Luh menjadi salah satu produsen alas kaki olahraga terkemuka di dunia dengan lokasi manufaktur di China, Vietnam, dan Indonesia.

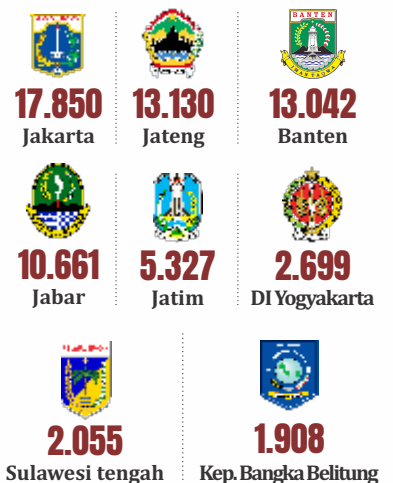
Hari ini, Ching Luh bekerja dengan beberapa merek besar di dunia. Mulai dari Adidas, FootJoy, Mizuno, Nike, dan Reebok.

Perusahaan punya dua pabrik di Indonesia, yaitu di bawah PT. Victory Chingluh Indonesia (JV) di Suka Asih dan PT. Victory Chingluh Indonesia (JVBT) di Sindang Sari. Ching Luh membangun fasilitas produksi pertamanya di Indonesia pada 2007 dan memulai produksi sepatu untuk Adidas dan Reebok. (din, ist wid, ant, bis/dya)

Daftar 8 Provinsi dengan

Jumlah Tenaga Kerja yang Terkena PHK

Paling Banyak



Sumber: Ketenagakerjaan

